

QUO VADIS INDONESIA PASCA PANDEMI COVID 19 ? ; MEMBACA ARAH POLITIK GLOBAL DAN NASIONAL¹

oleh : Ali Martin²
alimartin@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Paper/tulisan ini merupakan penelaahan dampak dari pandemi virus Covid-19 terhadap peta politik nasional maupun secara global regional. Meskipun ini menjadi perdebatan diantara pandangan yang optimis dan pesimis. Berangkat dari realitas Covid-19 di beberapa negara, terjadi ujian yang erat bagi negara terkait dengan kapasitas dan kapabilitas setiap negara dalam penanganan Covid-19. Dalam kajian ini argumentasi bahwa terjadi pergeseran pola hubungan internasional dan juga nasional dari pola hubungan yang bersifat positive sum yang didasarkan kepada interdependensi, institusionalisme, multilateralisme, dan sistem demokrasi menjadi pola hubungan yang lebih mengarah kepada kerjasama dimana negara semakin memperkuat dirinya dan saling berkompetisi dengan negara lain.

Kata Kunci: Pandemi, Covid-19, interdependensi, multilateralisme

A. Pendahuluan

Berawal sejak akhir 2019 tepatnya bulan Desember 2019, munculnya virus yang menghebohkan seantero jagad dunia ini di Wuhan Propinsi Hubei – China (Republik Rakyat Tiongkok) membuat lanskap peta politik global, regional dan nasional berubah drastis. Merebaknya virus ini yang kemudian dikenal dengan istilah *Coronavirus disease 2019* atau juga Covid-19, yang mana beberapa waktu disusul pengumuman oleh otoritas kesehatan dunia yakni WHO (*World Health Organizations*) yang menyatakan Covid-19 sebagai virus pandemi global *Coronavirus disease 2019* (Covid-19)³. Dengan demikian virus Covid-19 (*Coronavirus disease*) kini menjadi permasalahan global, baik negara-negara maupun organisasi internasional yang membidangi berbagai kerjasama multilateral.

Seiring berjalannya waktu merebaknya virus Covid-19 ini berbagai negara di belahan penjuru dunia berjibaku dalam mengatasi dan menangani penularan virus Covid-19 secara massif tersebut. Cara penanganan virus Covid-19 ini diberbagai negara dan bermacam pola prosedur yang beriringan dengan jumlah kematian seakan berkejaran berpacu dengan waktu. Beragam cara semua pemerintah di dunia secara global melakukannya, dari karantina wilayah

¹ Paper disampaikan pada Seminar Nasional Politik hubungan Internasional FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang, pada tanggal 31 Agustus 2021

² Dosen tetap Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang, alumnus doktor S3 Hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung.

³www.kompas.com - 12/03/2020, 08:31 WIB, *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global* <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

atau lockdown, gerakan pakai masker, pembatasan mobilitas, pelarangan aktivitas kegiatan hingga program vaksinasi gencar dilakukan oleh berbagai negara.

Perkembangan berikutnya permasalahan Covid-19 bukan hanya terkait masalah kesehatan saja. Namun kini sudah merambah pada semua sektor dan berdampak pada semua lini stakeholder. Pandemi Covid-19 ini mempunyai dampak yang luar biasa pada semua komponen, dari problem kesehatan, infrastruktur dan sistem kesehatan, problem sosial ekonomi warga, problem sosial budaya, industri yang turun drastis, pengangguran meningkat, daya beli turun, krisis ekonomi, krisis kepercayaan sosial, *social disorder*, *policy public health crisis*, hingga krisis kepemimpinan nasional. Maka pandemi virus Covid-19 ini merupakan entry point terhadap terjadinya krisis multidimensional secara sistemik tersebut.

B. Realitas Covid-19; Peta Politik Global dan Nasional

Perkembangan berikutnya bahwa pandemi Covid-19 ini menjadi momok menakutkan bagi negara-negara yang mengalaminya tanpa kecuali juga Indonesia yang mempunyai begitu banyak jumlah penduduknya serta mobilitas yang tinggi di warga masyarakat Indonesia. Dengan begitu beberapa negara telah mengambil kebijakan baik dari sistem jaminan kesehatan, hingga penanganan dampak pandemi Covid-19 maupun krisis keuangan melanda dalam penanganan Covid-19 ini.

Dalam penanganan virus pandemi Covid-19 ini sangat terlihat bagaimana kemampuan sebuah negara diuntut kesiapsiagaan untuk mengatasi pandemi virus Covid-19 ini, terutama bagi negara yang sistem jaminan kesehatan yang sudah cukup mapan, infrastruktur kesehatan dari tenaga kesehatan dan jumlah rumah sakit yang tersedia cukup untuk meanmpung pasien yang terpapar virus Covid-19 ini. Negara dengan kapasitas dan kemampuan yang maju juga masih mengalami kedodoran dalam menghadapi serangan virus Covid-19 ini. Hal ini dapat dilihat bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan sebagainya mengalami lonjakan dan daya tampung yang tidak memadai dalam penanganan kasus Covid-19 ini. Kapasitas dan kapabilitas negara sangat di uji dalam penanganan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan ini.

Pandemi virus Covid-19 ini juga membawa perubahan pada peta politik internasional, regional maupun nasional domestik di Indonesia. Secara Global pandemi Covid-19 ini memperlihatkan bagaimana rivalitas dan perlombaan antara Amerika Serikat (USA) dan China (Republik Rakyat Tiongkok/RRT) sangat kentara dalam isu Covid-19 ini, dari saling serang munculnya virus Covid-19 ini (bahkan Presiden Trump mengatakan Covid-19 ini sebagai Virus Chinese), hingga isu persaingan, perlombaan obat, perebutan vaksin antara

kedua negara sangat tergambarkan, dari produksi vaksin masing-masing yang cenderung memperlihatkan perebutan pasar konsumen bagi vaksin mereka ke negara-negara di dunia yang terdampak pada pandemi virus Covid-19 tersebut.

Selain itu persaingan kedua negara tersebut, muncul pula kekuatan-kekuatan lainnya yang ikut hadir dalam isu pandemi Covid-19 ini yakni beberapa negara baik di Eropa maupun Asia, yang memungkinkan untuk melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini cukup efektif dan komprehensif dengan melibatkan kerjasama-kerjasama negara-negara di kawasan-kawasan tersebut di atas. Maka pandemi Covid-19 ini juga memunculkan kekuatan multipolar dengan membawa modal kapasitas dan kapabilitas negara-negara tersebut, seperti di Hongkong, Taiwan, dan Korea Utara yang cukup otoriter mampu menekan angka kasus Covid-19, serta di kawasan Asia Tenggara ada Singapura, Malaysia dan Vietnam yang cukup efektif dan bahkan mampu meminimalisir jumlah kasus yang paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sama-sama di satu kawasan Asia Tenggara. Sehingga kekuatan-kekuatan multipolar tersebut berjalan dengan sendirinya dan mencari aliansi-aliansi serta kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak negara⁴.

Dari berbagai kasus secara global sangat terlihat kasus pandemi Covid-19 ini membawa dampak pada berbagai sektor lini kehidupan. Berawal krisis kesehatan, krisis pangan, krisis kepercayaan hingga krisis kemanusiaan, maka tidak heran bila sebagian negara melakukan sekuritisasi terhadap isu pandemi virus Covid-19 ini, dengan tujuan semata untuk melindungi warga negaranya dari kasus-kasu yang melonjak tajam di berbagai negara di beberapa kawasan.

Secara domestik di Indonesia dalam kasus Covid-19 ini juga mengalami fluktuasi yang sangat beragam dan cukup menguras energi dan anggaran negara. Dari problem krisis kesehatan, hingga krisis anggaran dalam penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat secara simultan akibat dampak dari pandemi virus covid-19 ini. Ditambah lagi leading sektor penanganan pandemi virus Covid-19 ini cukup membingungkan masyarakat karena yang di awal kasus ditangani oleh Kementerian Kesehatan, kemudian BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), hingga Menteri Koordinator investasi maupun KPEN (Komite Pemulihan Ekonomi Nasional). Bahkan kebijakan pusat dengan daerah kadang tida sinkron, seperti di awal merebaknya Covid-19, kebijakan Pemerintah Pusat berbeda dengan kebijakan

⁴ kasus Covid-19 yang sedikit dapat di tekan pada Taiwan, Vietnam dan Korea utara, dapat dilihat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5020545/taiwan-hingga-vietnam-sukses-tekan-corona-apa-rahasiannya>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian di level kebijakan dari ditelorkannya karantina wilayah, pembatasan mobilitas sosial (PSBB, PPKM berbagai level) hingga bantuan sembako, subsidi dana ke sektor-sektor Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sektor industri dan semua hajat hidup masyarakat yang terkena dampak pandemi virus Covid-19 secara massif digelontorkan.

Akan tetapi berbagai kebijakan tersebut mengalami ambiguitas di level praktik ketika dijalankan dan diterapkannya kebijakan tersebut. Satu sisi pembatasan mobilitas mengurangi kegiatan ekonomi dan di sisi lain jika diperbolehkan sangat mengkhawatirkan penyebaran virus Covid-10 tersebut. Maka injeksi dan subsidi dana menjadi jalan agar peningkatan daya beli masyarakat akan pulih.

Jika kita melihat kondisi postur APBN Republik Indonesia tahun 2021 ini, dapat digambarkan bagaimana kesiapan negara dalam menangani kasus Covid-19 sangat terbaca. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) tahun 2021 posisi utang luar negeri kita tertanggal per-Februari 2021 adalah sejumlah US\$ 422,6 milyar, dengan asumsi bahwa US\$ 1 sama dengan Rp. 14.646, atau setara dengan Rp.6,418 Trilyun. Meskipun utang tersebut bisa dikatakan utang jangka panjang baik pemerintah maupun swasta, namun APBN tahun 2021 ini diarahkan bersifat ekspansif dan konsolidatif. Kemudian anggaran APBN kita ini juga difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19 dan anggaran untuk penguatan reformasi, maka hitungannya dengan pendapatan negara sekitar Rp.1,743 Trilyun, dari jumlah pajak sebesar Rp.1.444,5 Trilyun, jumlah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.298,2 Trilyun, dan dari Hibah sebesar Rp.0,9 Trilyun.

Kemudian dari belanja negara sebesar Rp 2.750,0 Triliyun, terdiri belanja pusat Rp.1.954,5 Triliyun, lalu TKDD 795,5 Triliyun, jumlah pembiayaan Rp.1006,4 Triliyun, serta Defisit 5,7% PDB. Kemudian hal ini juga dapat dilihat karena terjadinya fiscal space terbatas dan defisit anggaran cenderung meningkat, yang mana hal ini disebabkan yakni tax ratio 1 (satu) digit dan cenderung menurun, sehingga belanja melebihi pendapatan. Disusul lagi realitas dilapangan di pusat maupun daerah, bahwa penyerapan anggaran ternyata juga kurang optimal penyerapannya (terjadi SILPA) dan pola menumpuk pada kuartal ke 4 (empat) tersebut. Selain itu juga adanya mandatory spending/afirmatif yakni pada anggaran pendidikan 20% APBN, dana alokasi umum (DAU) minimal 26% dari PDNN, serta anggaran kesehatan

5% dari APBN. Terakhir laporan utang Republik Indonesia per Mei 2021 mencapai Rp. 6.418 Trilyun⁵.

C. Prediksi Lanskap Politik Global dan Nasional

Konstelasi politik global mengalami pergeseran akibat terjadinya pandemi COVID 19 yang membuat arah politik luar negeri harus beradaptasi dengan kondisi pandemi tersebut, namun tatanan politik global masih berpijak pada kekuatan hegemoni dan dominasi. Bagi negara-negaratertentu peta politik global ini sangat menentukan pula dalam perjalanan ke depan terhadap isu-isu kontemporer yang melingkupinya. Sehingga pilihan rasional adalah berkoalisi, kerjasama dan kolaborasi menjadi satu pilihan bagi setiap negara untuk dilakukan (Fairman dkk, 2012).

Dalam konteks ini menghadapi De-globalisasi merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh banyak negara, ketika dunia mengalami ancaman pandemi Covid-19. Terjadi pergeseran tatanan politik global, terutama yang terkait kekuatan politik internasional. Kelompok negara maju di satu sisi, harus menghadapi realitas untuk melakukan penyesuaian pasca pandemic Covid-19. Terlebih eksistensi forum Selatan-Selatan (negara berkembang) semakin jelas dengan dukungan negara besar di belakangnya, yakni seperti Cina dan Rusia, yang selama ini kerap berseberangan dengan kelompok aliansi negara-negara maju sekutu. Sehingga pada ujungnya bagi setiap negara yang akan melakukan kerjasama dalam rangka penanganan Covid-19 ini haruslah berdasarkan national interest, kepentingan nasional masing-masing negara dalam bingkai kerjasama internasional mutlak dilakukan.

Sedangkan dalam konteks politik domestik nasional, akan dapat diprediksi apa yang akan dilakukan pemerintah berkuasa saat ini. Salah satunya akan adanya kebijakan lebih defensif dan efisiensi, terkait dengan postur anggaran APBN, mengingat saat diterpa pandemi virus Covid-19 ini menyedot anggaran yang cukup banyak, bahkan anggaran khusus untuk penanganan dampak dari pandemi virus Covid-19 ini juga terus dilakukan. Pemulihan ekonomi nasional sangat membutuhkan anggaran yang sangat luar biasa. Berbagai cara terkait kebijakan ekonomi mikro maupun industri besar agar terus berjalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang layak di subsidi dan di intervensi mengingat sektor ini membutuhkan sentuhan diskresi pemerintah agar ekonomi masyarakat terus berjalan. Karena seperti dua sisi mata uang, problem ekonomi ini pada ujungnya akan membawa ketidakpuasan publik warga negara terhadap kebijakan pemerintah, bahkan cenderung political distrust akan terjadi secara massif.

⁵ postur APBN mengalami perubahan beberapa kali sebagai respon kasu covid-19, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>

Dengan demikian dapat dibaca arah kebijakan pemerintah akan melaukan kecenderungan kebijakan pragmatis terhadap politik Anggaran dalam pengamanan APBN. Hal ini akan terlihat pada proses negosiasi yang terjadi di parlemen dan juga level kebijakan otoritas keuangan pemerintah. bahkan juga akan muncul “hidden democracy” sebagai akibat konsekuensi logis dari proses negosiasi tersebut. Maka politik anggaran ini cukup menyita waktu dan perhatian sebagian publik dengan membaca arah politik nasional yang berhadapan dengan hidden democracy tersebut, atau dapat juga dikatakan politik anggaran versus anggaran (ber) politik di tingkat eksekutif ataupun di legislative akan terjadi. Mengingat pasca pandemi virus Covid-19 ini kedepan politik nasional akan menghadapi pemilihan umum (Pemilu serentak 2024) termasuk pemilihan Presiden (Pilpres 2024), yang mana membutuhkan dana besar dari masing-masing partai politik untuk persiapan menuju Pemilu 2024 tersebut.

Pasca pandemi Covid-19 ini juga membawa isu yang tidak kalah menarik yakni, problem wacana Demokrasi yang semakin hari terjadi polemik atas berbagai kasus yang menimpa beberapa tokoh serta konflik-konflik horisontal maupun vertikal. Wacana demokrasi nasional menampakkan bagaimana demokrasi substantif melawan pelaksanaan demokrasi prosedural terus mengemuka, seperti wacana diusulkannya kembali dilakukannya amandemen UUD 1945, lalu munculnya isu masa jabatan presiden 3 (tiga) periode mengemuka ke publik. Maka negosiasi dan wacana publik muncul ke permukaan sebagai warning terhadap kelompok-kelompok koalisi pemerintah maupun yang oposisi terkait arah politik nasional ke depan. Sehingga terlihat akhir-akhir ini pragmatisme partai politik (Parpol) koalisi pemerintah berkuasa atau partai politik (Parpol) oposisi yang terkadang kabur, tidak jelas sikapnya terhadap isu-isu demokrasi di atas. Karena pada hakekatnya terjadi proses negosiasi-negosiasi di level elit yang kadang jauh dari harapan publik. Hal ini dapat dijelaskan pada masih berlaunya praktik-praktik Oligarki politik di elit politik semakin berkelindan satu sama lainnya terkait isu-isu politik ke depan menghadapi Pemilu 2024. Sehingga kekuatan kelas menengah seperti tiada arti, semua tersubordinasi dalam oligarki politik. Bahkan terlihat adanya kelas menengah dan kekuatan civil society yang mengalami disoriented dalam penyikapan isu-isu publik di atas.

D. Penutup

Arah tatanan politik global dan nasional ini akan terdiskripsikan pada beberapa hal yakni, *pertama*, Covid-19 adalah realitas bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa bencana wabah terbesar sebelumnya terjadi satu abad yang lalu, sekitar tahun 1918-1920 dimana wabah *Spanish influenza* menyerang dunia dengan korban meninggal dunia diperkirakan antara 50 – 100 ribu jiwa.

Kedua, model penanganan, China/RRT adalah paling banyak dirujuk mengingat Covid-19 ini muncul pertama kali di wilayah Wuhan China dimana pemerintahnya memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat di hampir semua kota yang terjangkau, terutama di wilayah Wuhan. Model berikutnya adalah Korea Selatan yang memilih karantina wilayah secara parsial namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, disertai pelacakan kontak, isolasi dan karantina terhadap mereka yang positif Covid-19 dengan pemantauan yang sangat ketat.

Ketiga, tiap negara menerapkan strategi kebijakan yang tepat dalam dua hal yang sangat bertentangan, yaitu menyelamatkan banyak nyawa dengan karantina yang ketat, tetapi disisi lain harus tetap memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian dari guncangan dampak Covid-19. *Keempat*, kapitalisasi pasar pada kuartal pertama ini adalah yang terburuk dalam sejarah dan masih akan terpuruk dalam jangka waktu yang belum dapat diprediksi. Beberapa sektor bisnis, terutama minyak dan gas, transportasi udara, perawatan kesehatan, dan keuangan akan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup lama, dan kemungkinan baru akan pulih paling cepat setelah tahun 2021 atau 2 tahun setelah pandemi Covid-19 ini. (McKinsey, Maret 2020).

Konstelasi politik global akan berubah sebagai implikasi dari Pandemi Covid-19, mulai dari pemetaan kekuatan negara dan aliansinya, sampai dengan arah politik luar negeri banyak negara. Pandemi Covid-19 ini akan membuat terjadinya pergeseran kekuatan global yang semula Amerika Serikat dan Eropa dianggap sebagai poros utama dari barat, sekarang perlahan bergeser pada poros timur (China/RRT dan Rusia). Poros barat dianggap gagal dalam memberikan respon yang tepat guna pada saat pandemic Covid-19 terjadi (kasus USA dan Eropa), di lain pihak China yang dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya pandemi covid-19 ini mulai menunjukkan respon yang lebih baik dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. China berperan signifikan dalam kerjasama pengadaan alat-alat medis di banyak negara, termasuk vaksin. Kerjasama dalam bidang riset kesehatan juga sedang intensif dilakukan oleh Cina.

Bagi Indonesia yang dalam dekade terakhir ini menghadapi konstelasi ekonomi politik global yang dinamis. Maka ke depan Indonesia memerlukan terobosan-terobosan baru dalam hal kebijakan, strategi dan diplomasi ekonomi dan politiknya di level internasional. Karena juga diplomasi tergantung pada kapan pandemi ini berakhir, yang membawa Covid-19 telah mengubah banyak pandangan politik dan ekonomi di tingkat global dan regional. Untuk itu, Indonesia perlu menerapkan politik luar negeri ke arah regional dan bilateral yang lebih intensif. Pandemi Covid-19 tercatat sebagai pandemi global, karena hanya dengan batas waktu enam bulan telah mengubah *global* dan *regional land scape*. Untuk itu, adaptasi kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu diambil pada tingkat nasional, regional, dan global. Mencermati tentang politik luar negeri Indonesia pasca pandemi covid-19. maka mulai 2022 bagaimana politik luar negeri Indonesia nantinya, adalah suatu proyeksi atau prediksi, Pandemi Covid-19 tidak hanya kondisi darurat kesehatan tetapi juga darurat ekonomi, dan bahkan ada beberapa negara yang telah memasuki kondisi darurat sosial serta darurat politik. Maka penguatan peran Indonesia di tingkat regional dan global menjadi tantangan besar, dengan melibatkan secara aktif semua komponen bangsa maka diplomasi Indonesia akan berhasil mencapai kepentingan nasional, dengan melibatkan semua aktor, dan tidak hanya monopoli pemerintah. Maka totalitas diplomasi menjadi penting sebagai jawaban arah tatanan politik domestik nasional menuju arah tatanan politik global dengan penerapan *new internasional land scape* tersebut di atas.

Daftar Pustaka

- Amitav Acharya dan Alistair Ian J. (eds.), *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*, Cambridge University Press, 2001.
- Andrew Heywood, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, New York, 2011.
- Balaam, D., dan B. Dillman, 2015. *Introduction to International Political Economy*. Boston: Pearson.
- Buzan, B., O. Waever, dan J. de Wilde, 1998. *Security: a New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Chomsky, N. dan R. McChesney, 1999. *Profit Over People, Neoliberalism, and Global Order*. New York: Seven Stories Press.
- Gilpin, R., 2001. "The State and Economic Development", dalam Gilpin, Robert (ed.), 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jackson, R. dan G. Sorensen, 2015. "International Political Economy: Classical Theories", dalam Jackson, R. dan G. Sorensen (eds.), 2015. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, W.W. Norton, New York & London, 2002.
- Waever, O., 1995. "Securitization and Desecuritization", dalam Lipschutz, Ronnie D. (ed.), 1995. *On Security*. New York: Columbia University Press
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5020545/taiwan-hingga-vietnam-sukses-tekan-corona-apa-rahasiannya>